



**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**TERHADAP**

**RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN  
ANGGARAN 2026**

<<>>

<<>>

<<>>

<<>>

<<>>

<<>>

<<>>

<<>>

**Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD**

**Jumat , 26 September 2025**



**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN  
TERHADAP  
RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026**

**Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan  
Jumat, 26 September 2025**

**AssalaamualaikumWr.Wb**

**Salam Sejahtera Bagi Kita semua**

**Yang terhormat**

-Sdri Bupati Pekalongan

**Yang Kami hormati,**

- Sdr. Wakil Bupati Pekalongan
- Sdr. Pimpinan dan para Anggota DPRD Kab. Pekalongan
- Para Anggota Forkopimda Kab. Pekalongan, Sdr. Ketua PN dan Ketua PA atau Yang mewakili.
- Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah , dan Kepala Bagian Setda Kabupaten Pekalongan
- Rekan-rekan wartawan dan segenap tamu undangan yang berbahagia

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Kita dapat berkumpul pada hari yang membahagiakan ini dalam rangka untuk agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2026, dalam keadaan sehat walafiat.

Sholawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahummasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alisayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Aamiin yaa rabbalalamin.

## **Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia**

Mengawali pembacaan pandangan umum ini, kami Fraksi persatuan pembangunan ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Sidang atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Kami dan juga ucapan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Raperda APBD tahun anggaran 2026.

Tak lupa juga kepada pihak eksekutif, apresiasi juga Kami sampaikan atas program-program yang telah berjalan dengan baik di tahun anggaran sebelumnya, disertai dengan tuntutan untuk perbaikan terhadap program-program yang dinilai kurang efektif. Termasuk didalamnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.

## **Hadirin yang terhormat,**

Sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pembahasan APBD merupakan salah satu fungsi utama DPRD, yakni fungsi anggaran. Untuk itu, Kami memandang proses ini bukanlah sekedar rutinitas tahunan, melainkan sebuah momentum strategis untuk memastikan setiap anggaran dari uang rakyat ini dialokasikan secara tepat sasaran, efisien dan berkeadilan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Setelah mencermati dan mempelajari secara seksama dokumen Raperda APBD Kabupaten Pekalongan Tahun anggaran 2026, maka Kami FPP ingin menyampaikan Pandangan Umum sebagai berikut :

### **1. Sisi Pendapatan Daerah**

Kami memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Daerah yang telah menyusun target Pendapatan daerah dengan optimis yaitu sebesar Rp 2.406.734.948.163,- (Dua trilyun, Empat ratus enam milyar, Tujuh ratus tiga puluh empat juta, Sembilan ratus empat puluh delapan ribu, Seratus enam puluh tiga rupiah). Namun, Kami perlu memberikan catatan yaitu terkait Pendapatan Asli Daerah. Kami mempertanyakan sejauh mana realisasi target PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Mohon

penjelasan mengenai strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut tanpa memberatkan pelaku usaha kecil dan masyarakat. Sedangkan terkait dana transfer dari pemerintah pusat, Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk terus pro aktif menjalin komunikasi dan koordinasi agar alokasi dana yang diterima sesuai dengan kebutuhan riil daerah kita. Semoga dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini menteri keuangan yang baru, realisasi jumlah dana transfer dari pemerintah pusat bisa lebih baik.

## 2. Sisi Belanja Daerah

Alokasi belanja merupakan cerminan dari prioritas pembangunan. Untuk itu Kami mohon untuk diperhatikan beberapa hal berikut :

- Pertama, terkait dengan Kesesuaian dengan prioritas pembangunan. Kami meminta penegasan bahwa alokasi belanja telah sepenuhnya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Jangka Panjang Daerah. Program dan kegiatan yang tercantum harus mampu menjawab isu-isu strategis daerah.
- Kedua, terkait Belanja Wajib (Mandatory Spending). Kami mengapresiasi pemenuhan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan minimal 20% dan kesehatan minimal 10%. Namun Kami ingin perincian untuk memastikan efektifitas program-program kedua sektor tersebut tidak hanya gugur kewajiban secara kuantitas tetapi juga harus secara kualitas.
- Ketiga, terkait infrastruktur. Meskipun konsep pembangunan harus merata di semua wilayah, namun tidak ada salahnya untuk memberikan perhatian khusus kepada wilayah yang masih tertinggal baik infrastruktur jalan , irigasi maupun akses air bersih. Termasuk juga wilayah yang rusak infrastrukturnya dikarenakan bencana atau fenomena alam.
- Keempat, terkait Pemberdayaan Ekonomi. Di tengah tantangan ekonomi saat ini, Kami memandang alokasi anggaran untuk pemberdayaan UMKM, pelatihan kerja, dan bantuan modal usaha masih perlu ditingkatkan.
- Kelima, terkait Efisiensi Belanja Operasional. Efisiensi pada pos-pos tertentu, sesuai amanat dalam Inpres No 1 tahun 2025 harus terus di upayakan agar sumber daya fiskal dapat lebih banyak dialihkan untuk belanja publik yang produktif.

## 3. Sisi Pembiayaan Daerah

Terkait adanya defisit yang di rencanakan dari SILPA tahun sebelumnya dan dari utang daerah, Kami berharap sudah melalui perhitungan yang akurat dan hati-hati . Meskipun jumlah utang daerah masih dalam batas yang wajar, namun bagaimanapun juga utang daerah bagai pedang bermata dua. Di satu sisi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, di sisi lain membawa konsekuensi berupa kewajiban pembayaran pokok dan bunga di masa

mendatang. Hal ini akan membebani APBD tahun-tahun berikutnya dan mengurangi ruang fiskal untuk program-program lain. Oleh karena itu pengelolaan utang yang hati-hati dan transparan menjadi krusial. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pinjaman yang dilakukan benar-benar produktif dan mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar daripada beban yang ditimbulkannya.

## **Hadirin Sidang Paripurna yang Kami muliakan,**

Demikianlah Pandangan Umum dari Kami, Fraksi Persatuan Pembangunan tentang APBD Kabupaten Pekalongan tahun Anggaran 2026. Kami menyakini Raperda ini sudah diusahakan maksimal demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten tercinta ini. Selanjutnya, Kami menyerahkan kepada alat kelengkapan dewan dan pemerintah daerah untuk melakukan penajaman melalui pembahasan lebih lanjut secara details.

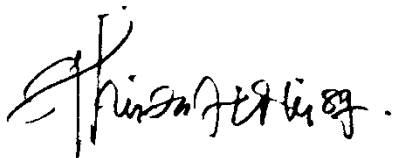
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya dalam setiap langkah kita. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam

**Wallahul muwafiq ilaa aqwamith thooriq**

**Wassalaamu'alaikumWr.Wb**

**FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KETUA**



**H. MIRZA KHOLIK**

**SEKRETARIS**



**MOH.WYLDANYL FIRDAUS,S.Ked**

